

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Topik Penelitian

Dalam penelitian ini, topik yang dibahas adalah mengenai efektivitas sistem pengendalian internal pembelian kredit. Penelitian ini akan dilakukan melalui studi kasus pada PT Serbaneka Guna Abadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah efektivitas sistem pengendalian pembelian kredit pada perusahaan sudah efektif. Hasil penelitian yang didapat akan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam PT Serbaneka Guna Abadi, serta informasi yang penulis dapatkan dari perusahaan tersebut.

Sistem pengendalian internal dalam sebuah perusahaan berperan penting dalam berjalannya kegiatan bisnis perusahaan. Dalam penelitian ini, PT Serbaneka Guna Abadi merupakan sebuah perusahaan dagang sehingga memiliki sistem operasi pembelian. Dalam sistem operasi pembelian, perusahaan akan membeli barang untuk dijadikan stok atau persediaan yang nantinya akan dijual kembali kepada pembeli, guna mendapatkan laba.

Salah satu tujuan pengendalian internal yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, di mana untuk memberikan informasi yang akurat mengenai operasi perusahaan, yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan. Manajemen diharapkan mampu merancang sistem pengendalian internal yang memadai supaya tujuan tersebut dapat dicapai oleh perusahaan.

PT Serbaneka Guna Abadi dalam menjalankan praktik bisnisnya, hal yang seringkali terjadi adalah karyawan melakukan kesalahan pembelian stok karena salah memesan spesifikasi produknya ataupun kesalahan pembeli dalam menyebutkan spesifikasi produk yang mereka inginkan, sehingga barang yang dibeli oleh karyawan PT Serbaneka Guna Abadi juga menjadi salah. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi pertanda bahwa ada sistem pengendalian internal dalam operasi pembelian yang tidak efektif, yang kemudian akan berdampak ke proses bisnis secara keseluruhan. Misalnya, stok menjadi menumpuk di gudang karena barang yang sebelumnya salah dan terlanjur dibeli belum laku sehingga stok menjadi usang, berkurangnya laba perusahaan, serta pembeli menjadi tidak puas karena harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi pesannya. Oleh karena itu,

perlu dilakukan uji efektifitas sistem pengendalian internal operasi pembelian pada PT Serbaneka Guna Abadi.

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yaitu sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan supaya entitas dapat mencapai tujuan dan sasarannya, yang dirancang dan dibentuk oleh manajemen perusahaan dengan keyakinan memadai (Jusup, 2014). Pengendalian internal juga disebut sebagai prosedur yang dapat melindungi aset perusahaan dari berbagai kesalahan penggunaan, serta memastikan mengenai keakuratan informasi yang disajikan (Fees, 2006).

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

(Jusup, 2014) menyatakan bahwa lazimnya, manajemen memiliki tiga tujuan umum ketika mereka merancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif. Tujuan yang pertama ialah keandalan pelaporan keuangan entitas, di mana manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh investor, kreditor, dan berbagai pihak lainnya, dengan tujuan untuk menjaga pengendalian internal yang baik atas pelaporan keuangan. Tujuan yang berikutnya yaitu efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, karena pengendalian dalam suatu organisasi akan membantu terjadinya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menggunakan berbagai sumber dayanya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mematuhi dan menyesuaikan dengan undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku.

2.2.3 Responsibilitas Manajemen dan Auditor Atas Pengendalian Internal

Menurut Jusup (2014), antara manajemen dan auditor mempunyai responsibilitas yang berbeda, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Responsibilitas manajemen dalam menetapkan pengendalian internal
Terdapat dua konsep yang mendasari perancangan dan penerapan pengendalian internal oleh manajemen, antara lain:
 - a. Keyakinan memadai

Keyakinan memadai bukanlah merupakan keyakinan mutlak, sehingga konsep tersebut tidak akan memberi jaminan yang absolut kepada pencegahan atau pendeteksian kesalahan penyajian material secara tepat waktu dengan pengendalian internal.

b. Keterbatasan inheren

Tanpa dilakukannya perencanaan dan pelaksanaan yang ketat, pengendalian internal tidak akan pernah berfungsi sepenuhnya. Meskipun individu yang menangani sistem memiliki kemampuan untuk membangun sistem yang ideal, kinerja dan efektivitas sistem tetaplah bergantung pada orang-orang yang menggunakannya.

2. Responsibilitas auditor dalam pemahaman mengenai pengendalian internal

Menurut Standar Audit (SA 315.12), auditor harus mampu mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal milik organisasi. Sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit mungkin dapat berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi tidak segala pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan akan relevan dengan audit. Audit harus memahami hal-hal berikut tentang penerapan pengendalian:

a. Karakteristik umum pengendalian internal.

Auditor harus mampu memahami maksud dari pengendalian internal seperti yang telah dijelaskan di atas. Auditor berkonsentrasi pada pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, tetapi tidak begitu memperhatikan pengendalian yang mempengaruhi informasi manajemen internal. Auditor akan lebih menaruh perhatian pada pengendalian internal perusahaan klien yang berkaitan dengan keamanan aset dan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b. Pengendalian yang berkaitan atau relevan terhadap audit.

Adapun berbagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam melakukan penentuan apakah pengendalian berkaitan dengan audit atau tidak, yaitu:

- Materialitas.
- Signifikansi risiko yang terkait.
- Ukuran organisasi.

- Sifat bisnis entitas, karakteristik dan kepemilikan organisasi juga termasuk di dalamnya.
 - Kompleksitas dan keberagaman operasi organisasi.
 - Berbagai keadaan dan komponen pengendalian internal yang berlangsung.
 - Sifat dan kerumitan sistem.
 - Bagaimana suatu pengendalian tertentu, baik secara mandiri atau dalam kombinasi dengan pengendalian lain, mencegah atau memperbaiki kesalahan penyampaian material.
- c. Sifat dan luas pemahaman atas pengendalian yang terkait dan relevan.
- Pertimbangan mengenai apakah rancangan pengendalian dapat sudah mampu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi penyalahgunaan penyajian material secara efektif, termasuk dalam evaluasi rancangan pengendalian. Jika pengendalian dirancang secara tidak akurat dan tepat, maka hal ini dapat menimbulkan kekurangan substansial dalam pengendalian internal.
- d. Elemen-elemen pengendalian internal.

2.2.4 Elemen atau Komponen Pengendalian Internal

Jusup (2014) mengatakan, untuk tujuan audit standar, pengendalian internal dibagi menjadi lima komponen. Komponen-komponen ini memberikan kerangka kepada auditor untuk memperhitungkan bagaimana berbagai elemen pengendalian internal yang berbeda pada suatu organisasi dapat mempengaruhi audit. Komponen-komponen ini yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.

Selain fungsi tata kelola dan manajemen, di dalam lingkungan pengendalian juga termasuk sikap, kesadaran, dan tindakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen terhadap pengendalian internal organisasi serta pentingnya pengendalian tersebut.

2. Prosedur penilaian risiko organisasi.

Penilaian risiko pelaporan keuangan yaitu pengenalan dan pencarian, serta analisis risiko yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan agar sepadan dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor akan mengumpulkan bukti yang lebih minim jika pihak manajemen organisasi

secara efektif sudah mampu menilai dan menanggapi risiko, dibandingkan dengan manajemen yang belum mampu.

3. Sistem informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, serta proses bisnis yang terkait dan komunikasi.

Sistem informasi terdiri dari perangkat lunak (*software*), orang, prosedur, data, dan infrastruktur (komponen fisik dan perangkat keras atau *hardware*). Pada umumnya, teknologi informasi dipakai oleh sistem informasi secara luas.

4. Aktivitas pengendalian.

Kebijakan dan tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko guna pencapaian tujuan organisasi dikenal sebagai aktivitas pengendalian. Secara umum, pengelompokan pengendalian yang sesuai dengan suatu audit sebagai kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pemeriksaan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta adanya pemisahan tugas.

5. Pemantauan pengendalian.

Pemantauan pengendalian yaitu prosedur-prosedur untuk mengevaluasi bagaimana pengendalian internal dilaksanakan oleh organisasi. Tindakan ini akan dilakukan oleh manajemen secara terus-menerus dan periodik.

2.2.5 Penilaian Risiko Pengendalian

Jusup (2014) juga mengungkapkan, supaya auditor mampu melaksanakan penilaian awal pada risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh pemahaman mengenai rancangan serta penerapan pengendalian internal. Penilaian tersebut termasuk dalam bagian evaluasi menyeluruh risiko kesalahan penyajian material. Namun, sebelum hal tersebut dilaksanakan, auditor akan menentukan dahulu jika organisasi dapat diaudit atau tidak. Berikutnya, auditor akan menentukan risiko kontrol dari pemahaman ataupun pengetahuan mengenai organisasi. Kemudian auditor menentukan risiko pengendalian dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan mengenai pengendalian dan adanya indikasi defisiensi atau indikasi kelemahan.

2.2.6 Defisiensi atau Kelemahan Pengendalian Internal

Sekiranya para anggota organisasi gagal untuk menemukan dan membendung kesalahan pada saat yang tepat pada rancangan ataupun operasionalisasi pengendalian efisiensi pengendalian, maka terdapat defisiensi pengendalian yang terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Jusup (2014). Selain itu, kelemahan juga ditandai jika pengendalian tidak dilaksanakan seperti mana yang telah dirancang, bahkan sekalipun rancangannya sudah baik. Untuk itu, terdapat beberapa metode untuk memahami defisiensi tersebut, yakni dengan mengenali dan mencari tahu secara lebih mendalam mengenai pengendalian yang telah dilaksanakan oleh organisasi, melihat apakah ada pokok pengendalian yang belum dilaksanakan, meninjau jika ada alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengendalian, memutuskan jika defisiensi yang terjadi adalah defisiensi yang memiliki pengaruh besar atau tidak, serta memutuskan apa sajakah yang dapat menjadi portensi kekeliruan penyajian.

2.2.7 Menginformasikan Temuan Defisiensi Kepada Pihak Tata Kelola serta Manajemen Organisasi

Apabila auditor mendapati bahwa pengendalian internal organisasi masih ada kelemahan, tindakan yang selanjutnya akan dijalankan yaitu penginformasian dan pendiskusian kelemahan tersebut baik kepada TCWG (*those charged with governance* atau pihak tata kelola) maupun manajemen dari organisasi audit dilangsungkan, seperti halnya yang diungkapkan oleh Jusup (2014). Penginformasian yang dilangsungkan tersebut merupakan komunikasi bukan secara lisan, melainkan secara tertulis dan harus tepat pada waktunya, sesuai yang diungkapkan dalam SA 265.9.

2.2.8 Pengujian Pengendalian

Auditor berikutnya akan mendesain dan menjalankan pengujian kontrol supaya dapat dievaluasi dan dilakukan penilaian mengenai efektivitas kontrol atau pengendalian tersebut. Auditor perlu menjalankan prosedur atau metode untuk menguji kontrol tersebut, seperti mendapatkan keterangan dengan menanyakan kepada anggota organisasi yang relevan atau sesuai, memeriksa dan meninjau dokumen-dokumen terkait, mengawasi dan mencermati implementasi kontrol, maupun mengecek ulang prosedur-prosedur. Agar mampu dihasilkannya keyakinan dengan taraf yang lebih besar, permintaan

keterangan perlu dipadukan dengan pelaksanaan ulang, sebab hanya dengan permintaan keterangan saja tidak cukup Jusup (2014).

2.3 Pembelian

2.3.1 Pengertian Sistem Pembelian

Sistem pembelian yaitu proses atau prosedur yang bertujuan agar bisnis atau perusahaan mendapatkan barang yang dibutuhkannya (Mulyadi, 2010). Perusahaan dapat menggunakan sistem akuntansi pembelian untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya.

2.3.2 Fungsi-Fungsi dalam Siklus Pembelian

1) Fungsi Gudang

Fungsi ini berperan dalam melakukan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian serta melakukan penyimpanan barang sebelum barang laku terjual (Mulyadi, 2010).

2) Fungsi Pembelian

Fungsi ini berperan dalam mendapatkan informasi tentang harga barang, memilih pemasok dalam pembelian barang, serta melakukan pembelian barang (Mulyadi, 2010).

3) Fungsi Penerimaan

Fungsi ini berperan untuk memeriksa jenis, tipe, kualitas, ataupun kuantitas barang yang dibeli dari pemasok (Mulyadi, 2010).

4) Fungsi Akuntansi

Dalam fungsi ini, fungsi yang terkait dengan operasi pembelian yaitu fungsi pencatatan utang, yang bertugas mencatat transaksi dalam register bukti kas keluar dan menjaga rekaman dokumen sumber, yang berguna sebagai catatan utang, serta fungsi pencatatan persediaan yang berguna untuk mencatat harga pokok barang yang dibeli (Mulyadi, 2010).

2.3.3 Dokumen-Dokumen Terkait

Berbagai dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi pembelian menurut Mulyadi (2010) yaitu surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, dan juga surat order pembelian. Dalam surat order pembelian, juga

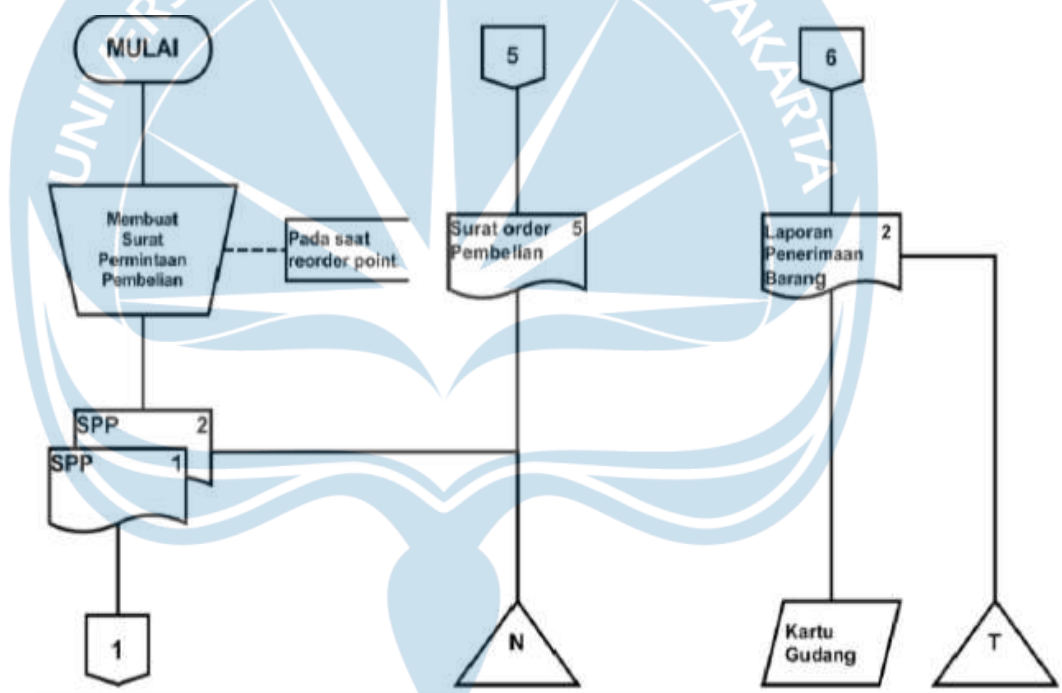
terdapat surat tembusan dari pemasok dan unit peminta barang, arsip penerimaan, dan juga arsip pemasok.

2.3.4 Flowchart

Perancangan suatu entitas atau organisasi harus berlandaskan faktor utama sistem pengendalian internal, yaitu dipisahkan berdasarkan fungsinya, yakni fungsi operasi, penyimpanan, dan juga akuntansi. Maka dari itu, *flowcart* terkait sistem operasi pembelian, sebagai berikut:

Gambar 2.1

**Flowchart Operasi Pembelian
Bagian Gudang**



Sumber: Mulyadi (2010)

Bagian Pembelian



```

graph TD
    DPM[Dari pemasok] --> SP[Surat pengantar]
    SOP3[SOP 3] --> MBSOP[Membandingkan SOP 3 dan SP]
    SP --> MBSOP
    MBSOP --> MPB[Memeriksa barang yang dikirim]
    MPB --> BLPI[Berbuat laporan penerimaan barang]
    BLPI --> SP3[SOP 3]
    SP3 --> SP2[SOP 2]
    SP2 --> LPP[Laporan penerimaan barang 1]
    LPP --> FAK[Faktur]
    FAK --> MBSOP2[Membandingkan faktur dan pemasok dg SOP & LPS]
    LPS1[LPS 1] --> MBSOP2
    MBSOP2 --> MBKK[Membuat bukti kas keluar]
    MBKK --> FAK2[Faktur]
    FAK2 --> LPS2[LPS 4]
    LPS2 --> SOP4[SOP 3]
    SOP4 --> BKK[Bukti Kas Keluar 1]
    BKK --> RBK1[Register Bukti Kas]
    RBK1 --> RBK2[Register Bukti Kas]
    RBK2 --> T1((10))
    T1 --> ABK[Arsip bukti kas keluar yang belum ditayof]
    ABK --> SELESAI[SELESAI]
  
```

Sumber: Mulyadi (2010)

2.4 Pembelian Kredit

Pembelian kredit dapat diartikan sebagai kesanggupan dalam menjalankan suatu kegiatan pembelian dengan membuat suatu pinjaman berdasarkan suatu janji. Pembayaran sebagai bentuk dari pemenuhan janji akan dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati pihak yang melakukan transaksi tersebut (Astiko, 1996). Suatu kredit akan timbul setelah suatu pihak melakukan pinjaman kepada pihak lainnya. Pinjaman ini dapat berwujud uang, barang, dan lain-lain, yang dapat mengakibatkan timbulnya tagihan bagi kreditur. Dengan adanya kegiatan transaksi secara kredit akan menyebabkan timbulnya utang atau kewajiban untuk membayar bagi debitur serta piutang atau tagihan bagi pihak kreditur.

2.5 Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu koneksi antara keluaran atau output dengan tujuan, atau rasio yang menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan organisasi dengan level output serta prosesnya (Dompas 2022). Dalam efektivitas juga termasuk pertimbangan dari usaha yang dilakukan, peringkat kepuasan yang didapat, serta intensitasnya. Dalam pengukuran efektivitas dapat membandingkan target yang direncanakan organisasi atau ekspektasi dengan kenyataan yang terjadi atau realisasinya.

2.6 Prinsip COSO

1. Lingkungan pengendalian

Berdasarkan COSO Framework (2013), organisasi atau entitas harus memiliki integritas dan nilai etika, memiliki pengawas yang independen, mengawasi dan menjalankan pengendalian internal, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, serta sejalan dengan tujuan organisasi.

2. Penilaian risiko

Berdasarkan COSO Framework (2013), organisasi atau entitas harus mempunyai kebijakan yang mampu memenuhi penilaian risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dan risiko terjadinya kerugian oleh organisasi.

3. Aktivitas pengendalian

Berdasarkan COSO Framework (2013), organisasi atau entitas harus dapat memastikan bahwa ada pengendalian internal yang efektif. Hal ini dapat dilihat

dari adanya pengawas yang memiliki kewajiban untuk mengawasi pekerjaan setiap karyawan, serta bertugas untuk memberi otorisasi agar mampu meninjau dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang berpotensi terjadi. Selain itu, organisasi dapat menjalankan pengendalian atau pengecekan secara fisik, dan menerapkan pembagian tugas.

4. Informasi dan komunikasi

Berdasarkan COSO Framework (2013), organisasi atau entitas harus mempunyai informasi dengan akurat serta komunikasi yang efektif dan baik. Hal ini dapat dijalankan dengan memastikan komunikasi berjalan lancar antara para karyawan dan atasannya, misalnya dalam hal beberapa aktivitas yang membutuhkan adanya otorisasi. Dengan adanya informasi akurat dan komunikasi lancar, manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan dengan baik.

5. Pemantauan

Berdasarkan COSO Framework (2013), organisasi atau entitas harus memastikan bahwa mereka memiliki tindakan pemantauan secara efektif. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menugaskan manajer untuk menjalankan pemantauan dengan aktif. Organisasi juga mengevaluasi apakah ada kesalahan yang terjadi, serta jika ditemukan ada defisiensi pengendalian maka dapat segera menindak lanjuti agar kesalahan tidak terulang pada masa depan.

2.7 Kerangka Penelitian

Pengendalian internal mempunyai peran yang fundamental dalam operasi pembelian. Terutama untuk memastikan adanya keamanan dalam pendapatan organisasi, atau dalam bisnis yaitu perusahaan. Adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan menjadikan kerawanan, terutama jika pengendalian internal tidak efektif ataupun terdapat defisiensi. Inilah yang menjadikan pentingnya organisasi mempunyai sistem pengendalian yang efektif atau memadai. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap pengendalian internal pembelian dengan memperhatikan komponen atau elemen pengendalian internal pada perusahaan yang diteliti, serta kemudian membandingkannya terhadap teori terkait. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah memakai prinsip COSO.